



Desakan Menunda Penyesuaian Tarif Air Pam Menguat

○ DPRD Jakarta: Kebocoran Masih 45 Persen

JAKARTA (Poskota) – Desakan untuk menunda kenaikan tarif air PAM menguat. Setelah fraksi PKB, kini giliran fraksi PSI DPRD Jakarta meminta untuk menanggukkan kebijakan yang rencananya akan mulai berlaku pada Januari 2025 ini.

Anggota DPRD Jakarta, Francine Widjojo mengatakan penyesuaian tarif air oleh PAM Jaya tidaklah mendesak. Apalagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dikatakannya masih mendapat laba bersih setiap tahunnya.

“Tahun 2023 laba bersih PAM Jaya bahkan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dan tahun 2024 PAM Jaya membagikan dividen ke Pemprov Jakarta Rp62,3 miliar. Tapi Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air rata-rata masih 45 persen per tahun sejak 2017,” kata Francine, kepada Poskota, Minggu (22/12).

Menurut Francine, PAM Jaya secara hukum juga tidak bisa menggunakan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 untuk menaikkan tarif air karena Keputusan Gubernur itu mengatur kenaikan tarif air minum.

“Air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih, bukan air minum, dan masih

sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya,” ucapnya.

Menurut dia, PAM Jaya harus lebih dulu menuntaskan masalah ketersediaan air bersih 100 persen yang disebut ditargetkan rampung pada 2030 mendatang.

Secara aturan, penugasan PAM Jaya untuk melayani 100 persen air minum melalui jaringan perpipaan di tahun 2030,” ujar Francine.

Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kenaikan tarif yang mulai dijalankan Januari 2025 dan masuk ke tagihan Maret 2025 dianggap akan memberatkan masyarakat karena bertepatan dengan momen menjelang Lebaran. “Masyarakat sudah dibebani kenaikan harga menjelang Lebaran, tidak perlu ditambah lagi dengan kenaikan tarif air,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Jakarta, Tri Waluyo juga meminta hal yang sama. Ia menilai kebijakan tersebut tidak tepat lantaran belum dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik untuk warga. Bahkan Tri mengaku telah meninjau langsung warga yang mengalami pelayanan buruk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Saya sudah datang dan melihat langsung air yang diterima warga di beberapa wilayah Jakarta Utara. Keruh dan berbau,” ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jakarta itu kepada Poskota, Kamis (19/12).

Lebih lanjut Tri mengatakan bahwa Komisi C yang menaungi BUMD memang tengah menggodok penyesuaian tarif air. Namun melihat fakta di lapangan belum baiknya pelayanan air kepada warga, ia pun meminta rencana tersebut untuk ditunda.

“Fraksi PKB dalam rapat bersama lalu telah meminta PAM Jaya untuk menunda penyesuaian tarif selama pelayanan belum diperbaiki,” ucap Tri yang juga tokoh masyarakat Jakarta Utara ini.

Sementara itu anggota fraksi PKS DPRD Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menekankan, walaupun ingin menaikkan tarif, maka harus ditujukan pada pelanggan yang mapan.

“Kita minta PAM Jaya membuat supaya kenaikan itu hanya untuk pelanggan-pelanggan yang memang mampu. Jadi di sini ada kelas-kelasnya kan ya, ada kelas 1, kelas 2, segala macam,” kata Taufik.

Dia juga meminta agar

PAM Jaya segera merampungkan perbaikan pipa yang ditargetkan rampung 100 persen pada 2030 mendatang. PAM Jaya, kata dia, harus menyediakan air dengan kualitas bisa diminum secara langsung dari keran. “Kualitas airnya itu menjadi benar-benar air yang bisa diminum langsung dari keran,” tegasnya.

Diberitakan Poskota, Rabu (18/12), sejumlah warga RT 02 RW 12 Lagoa dan RT 05 RW 05 Cilincing mengeluhkan air PAM Jaya yang mengalir ke rumah mereka keruh dan berbau.

Bahkan warga terpaksa memanfaatkan air tidak layak konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari meski berisiko terhadap kesehatan. Kondisi ini sudah warga alami selama belasan tahun.

Selama itu, warga mengaku telah merugi secara finansial. Sebab, mereka harus tetap menyetorkan uang bulanan sebagai tarif yang ditetapkan PAM Jaya, meski air yang mereka dapatkan tidak layak konsumsi.

Warga pun mau tak mau harus merogoh uang tambahan untuk membeli air bersih untuk keperluan memasak. Tak tanggung-tanggung, nominal yang warga keluarkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah. (pan)